BAB III

MENGURAI PROBLEM KORUPSI DI INDONESIA

A. Definisi Korupsi

Korupsi menjadi fenomena yang memprihatikan. Karena efeknya sangat mengancam kesejahteraan hidup orang banyak, bahkan lebih dari itu bisa meruntuhkan sebuah negara. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptus*. Artinya adalah tindakan yang merusak atau menghancurkan. Secara umum, pengertian korupsi disesuaikan dengan konteks bidangnya masing-masing. Jika korupsi dalam perspektif moral, berarti segala sesuatu yang merusak atau yang bertentangan dengan moral. Pada ranah hukum, korupsi berarti sesuatu yang melanggar hukum. Atau pada konteks politik, yang selama sering menghiasi wajah media, korupsi berarti penyalahgunaan wewenang atau kekayaan negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya.¹

Pada umumnya masyarakat menggunakan istilah korupsi untuk menyebut berbagai tindakan melanggar hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.² Selama ini belum ada definisi umum dan menyeluruh tentang korupsi, meskipun ada definisi seperti terurai di atas itu hanya sebatas perspektif pribadi atau definisi ilmiah terbatas, namun dalam praksisnya bentuk korupsi masih sangat beragam. Sehingga

¹ Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti-korupsi* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 8.

² Moh. Masyhuri Ni'am dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir & Fiqih* (Jakarta: TK GNPK NU, 2006), 23.

menyulitkan kita memberikan definisi final tentang korupsi. Namun kita tak bisa memungkiri bahwa bahasa korupsi lebih mengarah pada bentuk kecurangan dalam pencurian uang milik rakyat atau milik negara.

The Oxford Unabridged Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai “penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balasan jasa”.³ Pandangan ini mengarah pada makna korupsi sebagai bentuk tergerusnya integritas, lantaran begitu ambisiusnya diri mereka untuk menguasai uang publik dengan bentuk penyuapan. Fakta seperti sering kita jumpai, misalnya pada saat membutuhkan surat-surat yang berkaitan dengan instansi negara, agar mudah dan cepat, biasanya pegawai bersangkutan meminta bayaran lagi, sementara dari negara mereka sudah mendapatkan bayaran atau gaji.

Sementara *Webster’s Collegiate Dictionary* memberikan definisi tentang korupsi sebagai “bujukan untuk berbuat salah dengan cara-cara yang tidak pantas atau melawan hukum (seperti penyuapan)”.⁴ Pandangan ini mirip dengan definisi di atas, bahwa korupsi merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena merugikan orang lain, seperti penyuapan dalam hal tertentu, agar lebih mudah dan cepat, sementara pegawai tersebut sudah digaji negara sebagai bayaran atas tugas kerjanya di instansi bersangkutan. Kenyataan ini memang sangat memprihatinkan, karena rakyat secara langsung mengalami penderitaan atas berbagai tindakan pegawai nakal yang meminta suap agar permintaannya cepat selesai. Berbeda dengan Bank Dunia, pandangannya

³ Ibid., 24.

⁴ Ibid., 24.

tentang korupsi lebih umum. Baginya, korupsi merupakan “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*)”.⁵ Penyalahgunaan jabatan masih beragam bentuknya, bisa melalui penyuaapan, bisa juga melalui pencurian uang negara. Namun orientasinya untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentu tidak dibenarkan, karena jabatan publik diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama.

Definisi serupa juga dikeluarkan oleh *Transparency International (TI)*, yaitu: “Korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.⁶ Dalam fenisi ini, korupsi menjadi semakin jelas bahwa arahnya pada sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat dan negara. Karena fenomena yang selama ini disorot adalah tentang perilaku melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri melalui kekuasaan yang dimilikinya.

Asian Development Bank (ADB) memberikan definisi tentang korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang publik baik dalam sebuah pemerintahan atau lembaga swasta. Secara jelas korupsi yaitu: “korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk

⁵ Sudirman Said dan Nizar Suhendra, “Korupsi dan Masyarakat Indonesia”, dalam Hamid Basyaib, dkk (ed.), *Mencari Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku I, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), 99. Baca dalam Ibid., 24.

⁶ Lihat dalam *Transparency International*, Buku Sumber TI, diedit oleh Jeremy Pope, (Berlin: TI, 1996), 1. Baca dalam, Ibid., 24.

orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka di tempatkan.”⁷

Perluasan makna dalam urain di atas memberikan penjelasan, bahwa korupsi tidak saja menyangkut jabatan negara, namun bisa pula dalam sebuah perusahaan atau lembaga swasta. Spirit nilai yang dibangun adalah tindakan tidak pantas dan melawan hukum untuk memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Karenanya, bukan hanya dalam ranah pemerintahan, dalam hal apapun asal menyangkut kepentingan orang banyak bisa disebut sebagai perilaku korupsi. Sebab itu akan merugikan orang banyak, sementara jabatan yang dimilikinya sebenarnya dibuat untuk mempermudah akses publik terhadap layanan di lembaganya.

Kamu Besar Bahasa Indonesia juga memberikan definisi tentang korupsi sebagai “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.” Tak jauh berbeda dengan definisi di atas, bahwa bentuk korupsi tak terbatas pada lembaga negara. Pada lembaga swastapun bisa terjadi. Tetapi dalam definisi ini lebih terbatas pada penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan. Terkait dengan penyuapan tidak disebutkan secara konkret.

Sayyid Husein Alatas berpandangan bahwa korupsi merupakan perbuatan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan cara pencurian atau penipuan.⁸ Titik tekan Husein Alatas lebih pada moralitas,

⁷ Ibid., 24-25.

⁸ Dalam bentuknya yang bersifat memaksa, korupsi disertai dengan kekerasan. Pelaku korupsi tidak bersikap terbuka mengenai kepentingan dan tindakannya, mereka seperti malu-malu. Karena tindakan korupsi memang tindakan memalukan, yang tidak mungkin disampaikan atau

karena bangunan perspektifnya berlandaskan agama, sehingga moral sebagai penyangga tegaknya nilai-nilai agama menjadi acuan dasar dalam memberikan definisi terkait korupsi. Korupsi menjelma sebagai bentuk pelanggaran moral, karenanya bentuk tindakan ini dikecam pula dalam agama.

Pada sisi lain, kita akan menemukan Sayyid Husein Alatas dalam perspektif sosiologis, mialnya dalam buku *The Sosiologi of Corruption*. Pandangan Alatas ini tentu akan berbeda dengan pendekatan agama, politik maupun ekonomi, karena perspektif yang dibuatnya berbeda. Misalnya, Alatas memasukkan nepotisme sebagai bentuk korupsi, dalam klasifikasinya, memasang keluarga atau teman dalam posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan yang kompeten, merupakan bentuk perilaku korupsi. Hal ini tentu sulit dicari dalam hukum pidana, namun tetap merupakan bentuk perilaku korupsi.⁹ Korupsi dalam hal ini menjadi beragam, segala bentuk penyimpangan yang merugikan orang banyak merupakan bagian dari korupsi.

Intlektual Islam Indonesia, Azyumardi Azra secara praktis, memberikan pengertian bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'Ada>lah*), akuntabilitas (*al-Amana>h*), dan tanggung jawab.¹⁰ Korupsi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama, lantaran hal itu merupakan bentuk perusakan

diperlihat di depan publik. Baca dalam Sayyid Husein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3S, 1987), 225.

⁹ Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 6.

¹⁰ Padangan Azyumardi Azra ini dikutip tanpa judul buku dan halaman dalam Ulul Albab *A to Z Korupsi: Menumbuhkembangkan Spirit Antikorupsi* (Surabaya: Jaringan Pena, 2009), 188.

terhadap hak-hak negara dan masyarakat. Prinsip dasar yang dibangun oleh Azyumardi adalah keadilan. Kebijakan publik yang dilakukan oleh seorang pejabat negara dapat dikategorikan korupsi bila dilakukan tidak secara adil. Keadilan menysarakatkan persamaan hak dalam ketentuan yang tidak diskriminatif.

Sedangkan akuntabilitas menysarakatkan keterbukaan informasi terkait kebijakan yang dilakukannya. Era digital dengan keterbukaan informasi menjadi pembuka bagi ruang akuntabilitas setiap kebijakan penyelenggara negara. Sehingga bila pemerintah melakukan ini secara berkala, niscaya perilaku korupsi akan semakiin berkurang. Sebab publik secara bebas dapat berpartisipasi mengawasi setiap bentuk kebijakan pemerintah. Tuntuan transparansi sekarang menjadi tren dunia pemerintahan modern. Sudah menjadi tugas pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang memihak pada rakyat dengan sistem akuntabilitas di dalamnya.

Bagian akhir dari catatan Azyumardi Azra adalah tanggung jawab. Apapun bentuk tugas yang dibebankan, memang harus dijalankan secara amanah. Apalagi hal itu menyangkut kepentingan orang banyak. Bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab juga merupakan bagian dari perilaku korupsi, karena akibat dari hal tersebut sangat mengancam kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama sebuah bangsa. Tanggung jawab adalah komitmen bersama yang harus dipegang oleh seorang pejabat publik, sebab tugas mereka sangat besar dan menyangkut hajat orang banyak. Bila orang

bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan amanah sangat berbahaya terhadap kebaikan hidup bersama.

Menurut pandangan Ulul Albab, dalam konteks akademik, korupsi merupakan bahasan penting dalam berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, politik, dan administrasi publik. Sehingga karena itu, pandangan masing-masing disiplin ilmu sangat beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing, karena kajian keilmuan mereka punya pengaruh dalam memberikan sebuah definisi.¹¹ Pemaknaan yang tak terbatas ini menjadi penanda bahwa sejatinya korupsi itu punya ragam bentuk, tergantung pada bagaimana kita membuat konteks dan sudut pandang yang hendak digunakan untuk membaca sebuah problem penyalahgunaan wewenang atau pencurian uang yang menyangkut kepentingan publik.

Bowles (1999) pernah memberikan batasan definisi tentang korupsi menjadi dua bagian, yakni sempit dan luas. Definisi sempit pernah dikemukakan oleh Shleifer dan Visny (1993) yang mendefinisikan korupsi sebagai penjualan harta benda pemerintah oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadinya (*Government corruption as the sale by government officials of government property for personal*). Pandangan ini terbatas hanya pada penjualan barang-barang negara untuk kepentingan pribadinya. Artinya, sisi lain seperti suap, nepotisme, pencurian uang negara secara langsung tidak masuk pada kategori korupsi dalam perspektif Sheifer dan Visny.¹²

¹¹ Ibid., 6.

¹² Ibid., 6.

Sedangkan definisi secara luas pernah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, seperti pernah diuraikan oleh Bouckaert (1996) yang memberikan pengertian korupsi sebagai perilaku yang merugikan negara, baik dilakukan secara ilegal maupun legal.¹³ Pandangan ini sangat luas dalam segala hal, kata kuncinya adalah merugikan uang negara. Setiap tindakan yang merugikan uang negara merupakan bentuk praktik korupsi.

Dengan demikian, dalam pandangan Andreski (1978), korupsi tidak selalu diamati sebagai tindakan ilegal seperti mencuri atau menggelapkan uang negara. Kadang-kadang korupsi dilakukan dengan kesadaran penuh dan dilegalkan oleh negara. Berangkat dari dua gagasan yang ekstrem tersebut, Bowles memberikan definisi sebagai jalan tengah dari keduanya, antara Plato dan Aristoteles dengan Shleifer dan Vishny, bahwa korupsi adalah praktik penyelewengan yang merugikan negara yang bisa melibatkan birokrat dan kalangan non birokrasi, seperti dunia swasta.¹⁴

Korupsi memang selalu lekat dengan kekuasaan, karena tidak mungkin orang yang tidak punya kuasa akan melakukan tindakan penyelewengan. Meminjam bahasa Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut)". Gagasan ini menjadi penegas bahwa kekuasaan di berbagai belahan dunia manapun sangat cenderung untuk korupsi. Karenanya, Piers Beirne dan James Messerschmidt

¹³ Ibid., 6-7.

¹⁴ Ibid., 7.

mengelompokkan korupsi menjadi empat tipe. Yakni, Political Beribery, Politicak Kickbacks, Election Fraud, dan Corrupt Campaign Practices.¹⁵

“Political Beribery adalah kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan dan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyanggah dana. Di mana individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pada saat pemilihan umum dan yang kini duduk sebagai anggota parlemen dapat membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka”.

“Politicak Kickback adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak”.

“Election Fraund adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurang-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.”

“Corrupt Campaign Practice adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan”.¹⁶

Selain itu, karena pemaknaan terhadap korupsi bergantung pada perseptif masing-masing, Benviniste juga punya gagasan tersendiri. Korupsi baginya dikategorikan menjadi empat bagian: *Discretionery Corruption*, *Illegal Corruption*, *Mercenary Corruption*, dan *Ideological Corruption*.¹⁷

Pertama, *Discretionery Corruption* merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, meski nampaknya sah, namun sebenarnya tidak bisa diterima oleh publik karena ada manipulasi dan tindakan melanggar hukum. Seperti penyipuan yang diterima oleh pegawai tertentu untuk mempercepat urusannya.

¹⁵ Dani Kristiawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 31.

¹⁶ Ibid., 32.

¹⁷ Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme* (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), 17-18.

Kedua, *Illegal Corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Seperti permainan peraturan oleh pemenang tender karena dalam sebuah lembaga negara, dengan memperlakukan kata-kata hukumnya bukan substansinya, sehingga mereka mudah mendapatkan legitimasi guna mendapatkan keuntungan besar.

Ketiga, *Mercenary Corruption* yaitu jenis korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Seperti memenangkan tender perusahaan tertentu, bila mereka siap membayar atau menyogok dengan besar, sehingga pejabat negara bersangkutan mendapat keuntungan pribadi dari posisi jabatannya.

Keempat, *Ideological Corruption* merupakan jenis tindak pidana korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar keuntungan atau tujuan kelompok. Seperti penjualan aset BUMN untuk pemenangan partai politik tertentu yang didukungnya.

Beragam uraian mengenai definisi ataupun pembagian korupsi merupakan bagian dari dinamika akademis sebagai respon terhadap praktik korupsi yang terus menggurita di berbagai negara, secara khusus di Indonesia. Melalui pengayaan pandangan ini, besar harapan dapat mempermudah bagi kita untuk mendeteksi dan menghindari berbagai bentuk tindakan korupsi.

B. Sejarah Korupsi

Korupsi sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan dalam pemaknaan modern memang tidak setara tindak pidana pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Asumsi ini sebenarnya bergantung pada perspektif masing-masing orang yang memberikan analisa. Sebab korupsi sebenarnya seperti yang telah diurai dalam pembahasan definisi di atas, merupakan bentuk turunan dari berbagai macam kejahatan pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bila dilihat dari perspektif ini sesungguhnya korupsi begitu sangat tua. Dalam beberapa catatan sejarah, bentuk suap dan sogok sudah pernah terjadi dalam sejarah kepemimpinan Romawi Kuno, lazimnya penyuaipan terhadap hakim dalam sebuah perkara hukum.¹⁸

Selain Romawi Kuno, pada sejarah kepemimpinan di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cinan, Yunani korupsi telah pernah terjadi. Misalnya Hammurabi, seorang raja Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM pernah memerintahkan seorang gubernur provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan penyuaipan. Shamash (Raja Asiria) sekitar tahun 200 SM pernah menghukum hakim yang menerima suap. Bahkan Hammurabi mengancam memberikan hukuman mati bagi para pelaku korupsi, sebuah sikap ketegasan yang dimiliki oleh seorang raja dalam upaya menyelamatkan uang negara dan rakyatnya.¹⁹

¹⁸ Enggi Sujana, *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati* (Surabaya: JP Books, 2008), 1.

¹⁹ G.R. Driver, J.C. Miles (ed.), *The Babylonian Laws* (London: Oxford University Press, 1952), 69. Dalam Alatas, *Korupsi*, 1.

Di India korupsi sudah dilakukan setidaknya seribu tahun sebelum Isa, seperti halnya juga Yunani dan Cina. Hukum Manu menetapkan bahwa seorang raja hendaknya tidak berbuat serakah dan memeras uang rakyat dalam memungut pajak. Ia juga harus mengangkat orang yang jujur dalam memungut pajak. Raja yang menindas rakyatnya harus dibunuh beserta keluarganya. Pejabat yang korupsi dengan menerima suap orang-orang desa harus diusir dan harta kekayaannya disita.²⁰ Hukum yang tegas ini, memberikan penjelasan bahwa korupsi sejak lama menjadi musuh besar manusia. Sebab akibatnya sangat nyata dirasakan oleh masyarakat.

Perdana Menteri Maurya yang termasyhur pernah menaruh perhatian besar terhadap korupsi dan pengaruhnya terhadap pemerintahan. Filsafat Politik India selalu menekankan fungsi negara sebagai pelindung. Seorang Guru Digambara Jain, Somadeva, pernah mengatakan bahwa uang suap merupakan pintu masuk ke semua dosa. Raja yang penipu akan ditinggalkan rakyatnya dan tidak akan hidup lama.²¹ Kejujuran selalu menjadi kunci kelanggengan kepemimpinan seorang raja. Bila mereka tidak menjalankan kepemimpinannya secara jujur dan amanah pasti akan dihujat oleh rakyatnya.

Bila dikaitkan dengan logika kepemimpinan modern, pemimpin yang korup tidak akan mendapatkan simpati publik, sehingga bila ada kesempatan pemilihan umum mereka cenderung ditinggalkan oleh pemilihnya. Sebab sudah menjadi logika bersama, bahwa kepemimpinan menjadi tumpuan harapan bersama. Karena pada pemimpin kita menitipkan sejuta harapan.

²⁰ Ibid., 2-3.

²¹ Masduri, "Menghalau Kekerasan", *Koran Jakarta*, (30 Agustus 2013), 4.

Falsafah hidup yang dibangun oleh India Kuno tersebut penting menjadi perhatian kita bersama, dalam menatap masa depan negeri tercinta ini.

Sejarah lain, di Yunani Kuno, perhatian terhadap korupsi begitu sangat besar. Sebagai contoh, Kimon seorang prajurit dan negarawan terkemuka Athena yang dituduh melakukan pengkhianatan menerima suap dari Alexander raja Macedonia. Jaksanya adalah negarawan terkemuka juga, Pericles yang berusaha menggulingkan Kimon. Korupsi pada masa itu di Athena sangat menarik perhatian publik. Tetapi Kimon bisa dibebaskan atas tuduhan pada dirinya, namun persaingan antara keduanya terus berlanjut dalam rangka menarik perhatian publik.²²

Dalam upaya merebut simpati publik, Kimon menggunakan kekayaannya dengan cara membagikan makanan bagi rakyat miskin, membagikan pakaian bagi orang lanjut usia, serta membongkar pekarangan rumahnya agar orang bebas mengambil buah-buahan di pekarangan rumahnya.²³ Sedangkan Pericles yang tidak mempunyai kekayaan seperti dia, menggunakan kekayaan negara dalam meraih simpati publik. Pericles sering mengadakan pesta-pesta bagi khalayak umum, memberikan hadiah bagi hakim di pengadilan, dan menyuap rakyat secara besar-besaran sebagai upaya meraup simpati publik.²⁴ Dalam catatan Aristoteles, setelah itu korupsi

²² J. Bonner & Gertrude Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, Jilid II (Chicago: The University of Chicago Press, 1938), 30. Dalam Alatas, *Korupsi*, 4.

²³ Ibid., 4.

²⁴ Plutarch, *The Rise and Fall of Athens*, terj. Scott-Kilvert (London: Penguin Books, 1960), 174. Dalam Ibid., 4.

semakin merajalela.²⁵ Berbagai tindakan itu memberikan dampak bagi perubahan politik. Sehingga sepanjang sejarah Yunani, korupsi selalu menjadi perhatian yang harus dituntaskan. Karena dalam sistem nilai Yunani, korupsi sangat dikutuk dan ditolak.²⁶

Cerita turunan seperti yang dilakukan oleh Pericles kadang juga muncul di negara kita dengan berbagai modus kampanye menggunakan fasilitas negara. Bahkan kadang tak tanggung-tanggung melakukan pengkorupsian uang negara demi meraih jabatan. Persolan seperti ini ternyata bukanlah hal baru, tetapi sudah terjadi sejak lama dan turun-temurun mewarnai jalannya sebuah pemerintahan. Kita tentu merasa risih dengan peristiwa ini, karena sejarah menjadi cermin bagi kita untuk menatap masa depan.

Selain di Yunani, di Cina korupsi juga menjadi masalah yang akut sejak masa lalu. Orang-orang Cina yang bijaksana sangat menentang keras tindakan korupsi. Karena dampaknya sangat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Para Kaisar Cina mayoritas menaruh simpati yang besar terhadap orang-orang yang menentang tindakan korupsi. Tetapi karena sering terjadi paceklik, bencana alam, dan pecahnya peperangan, pemerintah yang waktu itu dipegang dinasti Han tidak mampu mengurusinya dengan baik, sehingga mereka memperbolehkan rakyatnya menjual anaknya dan mencari makanan di daerah lain.²⁷

²⁵ Aristotle, *The Athenian Constitution*, terj. H. Rackma (London: W. Heineman, 1952), 81 & 83. Dalam, *Ibid.*, 4.

²⁶ *Ibid.*, 5.

²⁷ *Ibid.*, 43.

Atas berbagai problem yang terjadi di negaranya, dinasti Han di Cina tersebut melakukan pemerasan terhadap rakyatnya. Untuk memenuhi tuntutan pemerintah, rakyat harus menjual segala miliknya dengan separuh harga. Beberapa di antaranya meminjam uang dengan bunga seratus persen. Sering pula ladang dan rumah dijual. Bahkan anak-anak mereka dijual guna membayar hutang-hutangnya.²⁸ Tuntutan pemerintah ini sangat kejam, dan merupakan tirani dari seorang pemerintah yang dilakukan secara sengaja.

Muncullah Tung Chung-Shu, ahli filsafat Konghucu yang terkemuka dizamannya, menyampaikan pidato di depan raja sekitar tahun 100 SM, ia mengecam tindakan pemerintah yang semana-mena memeras rakyat miskin, sedangkan mereka sudah hidup dengan sangat susah. Baginya hal itu akan menciptakan kekacauan yang semakin besar. “Rakyat, yang terjerumus ke dalam kepedihan, tidak mempunyai sarana untuk hidup; dan mereka menjadi pencuri dan penyamun”.²⁹ Mereka yang ditangkap dan dihukum jumlahnya puluhan ribu oleh pemerintah, sehingga dengan demikian tidak usah diragukan lagi bahwa korupsi pada saat itu begitu meraja lela.³⁰

Dalam sejarah Nusantara persoalan korupsi juga pernah muncul, misalnya dalam catatan Onghokham, korupsi pejabat selalu mengancam kedudukan raja dan pusat kekuasaan, sehingga ada semacam lembaga atau tindakan konfiskasi (penyitaan) terhadap kekayaan para menteri, khususnya menteri keuangan. Kadangkala penyitaan juga dilakukan terhadap gereja, ulama, dan pedagang (kreditor raja). Hal seperti ini pernah terjadi dalam masa

²⁸ Ibid., 44.

²⁹ Ibid., 45.

³⁰ Ibid., 45.

kerajaan Mataram (Islam), di mana Susuhanan menyita menyita harta milik pejabat publik yang dicopot jabatannya. Sedangkan pada pejabat Mataram yang terlalu memperkaya diri dikenakan denda-denda istimewa.³¹

Catatan sejarah tersebut memberikan sinyal bahwa problem korupsi bukanlah hal yang baru, bahkan bisa dikatan telah seusia dengan umut umat manusia di dunia. Barangkali hal ini merupakan implikasi dari istilah Thomas Hobbes yang menyebut bahwa manusia adalah *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Sikap rakus yang dimiliki oleh manusia, seringkali membuatnya lupa terhadap tugas hidup yang dinaugerahkan oleh Tuhan, sehingga kehadirannya ke dunia melahirkan petaka. Bila karakter “serigala” melekat dalam diri manusia, maka berbagai macam tindakan kejahatan sangat mungkin dilakukan.³² Sejarah korupsi yang telah ada beberapa ribuan tahun yang lalu menunjukkan karakter buruk tersebut. Sehingga upaya melakukan pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit, setidaknya-tidaknya hal yang sangat mungkin dilakukan adalah meminimalisir tindakan korupsi, atau mencegah perbuatan korupsi terjadi.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun tetap kesulitan menghalau tindak pidana korupsi. Namun mereka lebih mudah mendeteksi dan mencegah korupsi di dalam lembaga negaranya, ketimbang negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ke depan semangat antikorupsi harus menjadi nafas hidup bersama, karena sulit bagi kita menghalau apalagi

³¹ P.J.F, Louw & E.S. de Klerck, *De Java Oorlog, 1825-1830*, Batavia Landsdrukkerijik, 1894-1900 (5 Jilid). Dalam Onghokham, “Tradisi dan Korupsi”, Prisma, No. 2 Februari 1983, tahun XII. Dalam Eggi, *Republik Tanpa KPK*, 5.

³² Masduri, “Negara Harus Berdaulat”, *Medan Bisnis*, (20 Juli 2013), 2.

menghilangkan nafsu korupsi, karena itu menjadi warisan kejahatan kemanusiaan yang menggiurkan lantaran menguntungkan hidup mereka.

C. Problem Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia menjadi masalah yang akut, dari dulu hingga kini korupsi masih saja mewarnai perjalanan pemerintahan di Indonesia. Korupsi sudah menjadi bagian dari nadi pemerintahan, lantaran mereka tidak punya semangat yang besar dalam upaya penyejahteraan rakyat. Korupsi di Indonesia lahir selain karena miskinnya integritas, mereka terlalu tamak pada kekayaan, sehingga tanpa berpikir benar atau salah, pencurian terhadap uang negara sudah menjadi hal biasa. Korupsi terjadi di semua lini kehidupan, dari tingkat bawah sampai elit pemerintahan.

Lantaran korupsi kesejahteraan rakyat menjadi terkatung-katung, pembangunan infrastruktur tidak jelas rimbanya, ketidakadilan semakin marak, dan tindakan kriminal semakin sering terjadi, lantaran masyarakat semakin sulit mendapatkan kesejahteraan. Banyak di antara mereka yang melakukan pencurian, penjiplakan, dan perampokan sebab dililit oleh persoalan ekonomi yang tak kunjung membaik. Sedangkan elit pemerintah di atas, tidak ada putus-putusnya melakukan pengkorupsian uang negara. Di tengah penderitaan rakyat yang semakin akut, elit pemerintah belum sadar

juga. Mereka terus mereproduksi pengkorupsian uang negara dari beragam bentuknya.³³

Reproduksi korupsi yang dilakukan oleh elit pemerintah bisa kita lihat di media, betapa kejahatan korupsi selalu menjadi berita aktual yang menarik untuk didalami lebih jauh. Pemberitaan korupsi di media pasti ada setiap hari. Kejahatan kerah putih ini hadir dalam beragam bentuk, mulai perorangan, kerja sama, bahkan ada rekayasa partai dibalik perilaku korupsi tersebut. Sungguh korupsi sekarang ini menjadi penyakit akut bangsa Indonesia, yang jika dibiarkan akan “mematikan” Indonesia. Bayangkan hari ini koruptor membentuk regenerasi yang sistemik. Jika dulu yang terlibat korupsi elit pemerintah berumur di atas 40-an, sekarang sudah berkisar dalam umur 30-an. Fakta ini adalah pertanda buruk bagi masa depan Indonesia. Jika jiwa muda dan produktif banyak yang terlibat kasus korupsi, tentu hal ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia. Para pemuda mestinya berada di garda depan dalam menggerakkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun malah banyak terlibat kasus korupsi dan sudah banyak mendekam di dalam penjara.³⁴

Hadirnya pemuda dalam panggung korupsi di Indonesia tentu menjadi keperihatinan mendalam. Sebab produktivitas mereka masih sangat luar biasa dibandingkan dengan elit pemerintah yang sudah tua. Tenanga mereka masih sangat kuat dan tahan banting bekerja kapan dan di mana saja. Sehingga elit pemerintah yang masih muda digadang-gadang menjadi pemimpin di masing-

³³ Masduri, “Jalan Terakhir “Menebas leher” Koruptor”, *Duta Masyarakat*, (10 Desember 2012), 5.

³⁴ *Ibid.*, 5.

masing lembaga pemerintahan. Bahkan wacana tentang Presiden muda pernah menggelinding dalam berbagai pemberitaan media. Wacana tersebut tidak lain berangkat dari lemahnya kinerja Presiden yang sudah berusia tua, dan pemimpin muda biasanya lebih visioner dan mampu membaca kemungkinan masa depan yang lebih progres.³⁵

Jika dilacak secara mendalam kemunculan korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, mulai dari masa VOC, Pemerintahan Hindi Belanda, Masa Pendudukan Jepang, hingga masa Indonesia Merdeka dibawah kepemimpinan Sukarno, Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Perjalanan panjang yang dilalui bangsa ini telah memberi warna keruh terhadap berbagai macam munculnya problem korupsi. Sebagai upaya agar kita memiliki pemahaman yang komprehensif tentang korupsi di Indonesia, berikut sejarah singkat perjalan bangsa Indonesia sejak pra sampai pasca kemerdekaan dalam hal korupsi.

Sejak masa VOC, korupsi telah tumbuh subur di negeri ini. Bahkan organisasi dagang yang dulu pernah berjaya itu runtuh karena persoalan korupsi di internal lembaganya.³⁶ Korupsi di kalangan VOC terjadi karena ketidakpuasaan pegawainya atas gaji yang diterimanya. Minimnya gaji yang diterima pegawai tersebut lantaran VOC lebih dimonopoli oleh para elit, sehingga para pegawai yang tidak puas dengan gajinya yang minim banyak melakukan pencurian atau pengkorupsian kekayaan VOC.³⁷ Akibat berbagai

³⁵ Ibid., 5.

³⁶ Eggi, *Republik Tanpa KPK*, 5.

³⁷ Albab, *A to Z Korupsi*, 96.

tindakan pengkorupsian tersebut, VOC mengalami kerugian besar-besaran, hingga organisasi dagang tersebut bangkut dan bubar.

Praktik korupsi yang terjadi pada masa VOC memberikan kontribusi besar terhadap maraknya korupsi di Indonesia, sehingga kini korupsi menjadi budaya yang sudah menjadi kebiasaan para elit politik di negeri ini. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana korupsi berkembang biak sedemikian rupa di negeri ini, seolah-olah negara akan bangkut karena besarnya korupsi yang dilakukan oleh elit kekuasaan.

Penjajahan Belanda juga banyak menyisakan catatan buram, terutama dalam hal ini terkait korupsi. Hadirnya Hindia Belanda ke Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari sejarah VOC, karena itu ketika Belanda menjajah Indonesia budaya korupsi juga sudah menggurita. Apalagi sistem Belanda waktu itu menggunakan dua sistem, yakni *Bestuurs Beambten (BB)* dan *Pangreh Praja (PP)*, yang memicu semakin banyaknya praktik korupsi. Misalnya pada masa Belanda masyarakat diwajibkan tanaman paksa 1830-1870 jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa. Petani diwajibkan menanam 1/3 bagian dari tanahnya, tetapi dalam praktiknya kepala desa, demang, wedana, atau bupati yang bertanggung jawab terhadap tanam paksa, mewajibkan masyarakat menanam 2/3 tanahnya untuk tanaman tersebut.³⁸

Terlihat dengan jelas dari catatan sejarah tersebut, bahwa hasrat untuk memperkaya diri dengan memeras harta rakyat miskin sudah menjadi kebiasaan elit pemerintah di masa lalu. Hal tersebut terjadi lantaran ada

³⁸ Ibid., 102-103.

peluang dan minimnya integritas diri. Peluang yang ada terlihat dari wewenang yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada kepala desa atau bupati masa itu, namun kesempatan itu malah digunakan untuk menipu rakyat dengan menaikkan luas lahan tanam paksa. Lemahnya integritas terlihat, pada kesungguhan elit pemerintah dalam menjalankan tugas secara amanah dan jujur. Karena pemimpin yang punya integritas akan terus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin hadir untuk menebar harapan dan kerjas bersama guna mencapai cita-cita kemakmuran dan keamanan hidup bersama.³⁹

Setelah penjajahan Belanda, Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang keadaan Indonesia tak juga lebih baik dari penjajahan Belanda. Bahkan bisa dikatakan, penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun sama penderitaannya dengan penjajahan Belanda yang mencapai 3,5 abad. Korupsi pada masa Jepang juga masih menggurita. Apalagi pada masa Jepang terjadi kekacauan ekonomi besar-besaran, sehingga korupsi semakin merebak di mana-mana. Selain itu, ambisi Jepang yang sangat besar dalam memenangi perang di kawan Asia juga punya pengaruh besar terhadap korupsi, karena dalam perang tentu butuh materi yang cukup. Akibatnya

³⁹ Kita butuh pemimpin besar yang mampu menggerakkan rakyat ke arah visi kebangsaan (Rosalynn Carter). Kepemimpinan sejatinya bukan persoalan kekuasaan. Tetapi menyangkut kerja sama, agar semua komponen bangsa dapat bergerak ke arah yang diinginkan (Terry). Maka karena itu, kita butuh pemimpin besar yang mampu menggerakkan. Pemimpin yang menggerakkan adalah pemimpin yang menginspirasi rakyatnya. Inspirasi menjadi sangat penting dalam sebuah kepemimpinan, karena tidak mungkin sebuah negara besar akan dapat diurus oleh satu orang. Negara harus diurus secara bersama-sama oleh rakyatnya. Sehingga rakyat butuh inspirasi dari pemimpinnya, agar mau menggerakkan dirinya menyelesaikan masalah dan mencapai visi kebangsaan. Karena itulah, Ibnu Khaldun menekankan bahwa pemimpin itu harus orang yang paling ideal dalam semua aspeknya. Baca dalam, Masduri, "Pemimpin yang Menggerakkan", *Harian Analisa*, (1 Februari 2014), 23.

Jepang banyak mengabaikan pelayanan administrasi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.⁴⁰

Pada masa kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Sukarno, Indonesia sebenarnya punya harapan besar tentang kesejahteraan rakyatnya. Misalnya kita dapat melihat semangat itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengimpikan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang berdaulat, adil, dan makmur tentu hanya bisa dicapai melalui pemerintah yang bersih dan punya visi besar ke depan tentang kemajuan bangsa. Harapan besar waktu itu pada Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi tentu tidak mudah menhanguskan kebiasaan korupsi elit pemerintah yang sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda.

Dalam catatan Ulul Albab, ada dua hal yang mempengaruhi mengapa korupsi masih tumbuh subur di era ini. *Pertama*, pemerintah Orde Lama pernah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang banyak dikuasai asing. Tindakan progresif ini semestinya punya pengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi malah disalahgunakan oleh militer dengan manajemen yang tidak terkontrol, sehingga praktik korupsi tak terhindarkan. *Kedua*, pemerintah Orde Lama pernah mengeluarkan politik benteng, sebuah kebijakan yang seharusnya membentengi para pengusaha dalam negeri, tetapi malah disalahgunakan

⁴⁰ Albab, *A to Z Korupsi*, 108.

dengan kongkalikong dan korupsi, sehingga banyak tidakan mereka yang merugikan rakyat.⁴¹

Pada awal kepemimpinan Orde Baru di bawah Suharto, harapan baru tentang pemberantasan korupsi kembali muncul, namun harapan itu pupus seiring berlalunya waktu. Dalam perkembangannya, pemerintahan Suharto memang banyak melakukan pembangunan ekonomi makro, tetapi pada satu sisi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berkembang biak sedemikian rupa. Pada tahun 1998, *Corruption Perception Index* dari *Transparency Internasional* menempatkan Indonesia pada posisi ke 80 dari 85 negara. Dari data tersebut Indonesia dalam persepsi konsultan dan pelaku bisnis merupakan bagian besar dari negara-negara terkorup. Selain itu, dalam survei yang dilakukan oleh Konsultasi Rasio Ekonomi dan Politik berbasis di Hongkong pada tahun 1997 menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia.⁴²

Korupsi pada masa Orde Baru sangat beragam, mulai dari suap terhadap birokrat, politisi, dan pejabat pemerintah. Selain dalam bentuk suap, penggelembungan anggaran untuk mendapatkan keuntungan berbagai proyek pemerintah juga marak. Salah satu yang sangat tampak waktu itu adalah mudahnya akses keluarga Suharto dan orang-orang terdekatnya dalam mengakses berbagai kesempatan bisnis. Urusan bisnis milik keluarga Cendana sangat mudah, sehingga kekayaan keluarga Suharto begitu luar biasa, karena pusat-pusat perekonomian berada di bawah kekuasaannya.

⁴¹ Ibid, 120.

⁴² Ibid, 121.

Korupsi yang menggurita pada masa Suharto tidaklah langgeng, meski Suharto berkuasa sangat lama hingga 32 tahun, namun akhirnya Suharto tetap tumbang. Setelah mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran, tepat pada tanggal 21 Mei 1998 Suharto lengser. Lengsernya Suharto tidak saja memberi harapan baru dalam bidang korupsi, tetapi juga dalam banyak hal. Karenanya, kelengseran Suharto menandai era baru, sebuah era yang membuka sekat-sekat kebebasan, sehingga masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan berekspresi secara bebas tanpa intervensi dari siapapun. Era itu biasa kita sebut Era Reformasi, era yang menjadikan aspirasi masyarakat sebagai tumpuan setiap pembangunan bangsa dan negara. Era Reformasi diperakarsai oleh mahasiswa, sebagai penggerak perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diamankan dalam pembukaan UUD 1945.⁴³

Sebelumnya, hal yang sangat menakutkan dari Era Orde Baru adalah tindakan repseifnya yang dilakukan bagi siapapun yang dianggap bakal memberontak terhadap pemerintah. Daya kritis rakyat pada waktu itu benar-benar dibungkam. Tak segan-segan siapapun yang dianggap mengancam keberadaan Orde Baru mereka diculik dan dibunuh, sebuah tindakan tidak manusiawi yang dilakukan sebuah pemerintah. Akibatnya, sulit bagi rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah, sehingga korupsi di berbagai liniya begitu menggurita.

⁴³ Keberhasilan mahasiswa melengserkan Suharto dari kursi kepresidenanya merupakan bagian dari tugas mahasiswa sebagai *gent of change*, *agent of control*, *iron stock* dan *avant garde*. Baca dalam, Masduri, "Reformasi Kacau Balau", *Sinar Harapan*, (23 Mei 2012), 4.

Keberhasilan mahasiswa melengserkan Suharto dari jabatannya sebagai presiden tentu sangat kita apresiasi sekali, sebab sebelumnya sangat sulit sekali pemberontakan terhadap rezim yang berkuasa dilakukan. Seperti telah diurai di atas, paling-paling jika terjadi pemberontakan orangnya langsung hilang atau bahkan tidak segan-segan dilenyapkan nyawanya. Rezim Suharto sangat represif dan otoriter, kekuatan militer menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kekuasaan yang dipimpinnya. Maka ketika mahasiswa mampu menggalang kekuatan yang besar dan menumbangkan rezim Suharto, tepuk tangan bersorak-sorai di mana-mana. Tanda kemajuan bagi bangsa Indonesia sudah terbuka. Tinggal bagaimana kita mengelola kebebasan ini melanjutkan perjuangan yang dilakukan para mahasiswa 1998.⁴⁴

Nyatanya, sampai saat ini, reformasi yang kita lakukan tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan yang lebih sering terjadi kekacauan yang semakin parah. Bayangkan korupsi semakin marak, kekerasan dari beragam mudusnya mudah terjadi, kemiskinan semakin parah, hukum diperjual belikan, dan kebebasan pers semakin memperkeruh persoalan. Harapan-harapan yang begitu besar dengan hadirnya Era Reformasi semakin redup, melihat kenyataannya kehadiran Era Reformasi membaut negara kacau balau. Kebebasan yang terjadi melampaui etika kepatutan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD` 1945. Bahkan tidak jarang kebebasan yang ada banyak dikibiri oleh kepentingan elit politik. Sehingga kehadiran Era

⁴⁴ Ibid., 4.

Reformasi hanya memunculkan politikus-politikus busuk yang tak bertanggung jawab.⁴⁵

Mestinya kebebasan yang kita miliki, semakin menanusiakan manusia, dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena tidak lain, perjuangan yang dilakukan mahasiswa tahun 1998 hanya untuk terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia. Bukan untuk membebaskan para elit-elit korup mengeruk kekayaan negara sebesar-besarnya, sehingga nasib masyarakat kecil semakin terpuruk. Sangat emam, jika perjuangan mahasiswa yang melelahkan, bahkan mengorban nyawa hanya menghasilkan kesia-sian. Bahkan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor. Perjuangan mahasiswa tahun 1998 merupakan pengorbanan besar yang tak ternilai. Hanya saja pengorbanan tersebut, sering disalahgunakan oleh anak-anak bangsa.⁴⁶

Kehadiran Habibie menggantikan Suharto dalam panggung kepemimpinan nasional juga tak membuahkan hasil maksimal. Apalagi Habibie terkesan ragu-ragu menindak tegas korupsi yang dilakukan keluarga Suharto, sehingga gurita korupsi masih saja merejalela. Tetapi setelah itu greget melakukan perang terhadap korupsi semakin keras dengungnya. Misalnya, cita-cita Habibie ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, yang jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun dunia politik Indonesia waktu itu belum stabil, sehingga menjadi sulit bagi Habibie melakukan berbagai kebijakannya secara tegas, karena dukungan terhadap Habibie sebagai presiden terasa masih setengah-setengah. Dukungan yang

⁴⁵ Ibid., 4.

⁴⁶ Ibid., 4.

tidak penuh terhadap pemerintahan Habibie, menjadi bumerang tersendiri bagi dirinya.⁴⁷

Habibie turun dari jabatannya sebagai Presididen RI, hadir Gus Dur yang terpilih oleh MPR sebagai Presiden RI ke 4. Tampilnya Gus Dur dalam panggung politik nasional juga memunculkan harapan besar tentang pemberantasan korupsi. Selama ini Gus Dur dikenal sebagai tokoh prodemokrasi yang sangat getol menolak korupsi. Tetapi jalan di pemerintahan tidak mudah. Politik itu cair dan sulit diduga. Karenanya, usaha Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) akhirnya tidak berjalan mulus, karena dibubarkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan tidak lazim. Tetapi kita secara nyata dapat menangkap gereget Gus Dur dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi.⁴⁸ Meski akhirnya Gus Dur harus lengser dari kursi kpresidenannya karena permainan politik yang kurang sehat.

Harapan-harapan baru selalu muncul setiap kali hadir presiden baru. Kehadiran Megawati yang menggantikan Gus Dur juga tak lepas dari harapan itu. Apalagi selama ini Megawati dikenal sebagai tokoh yang sangat getol memusuhi Orde Baru, sehingga besar harapan Megawati mampu melakukan tindakan besar-besaran dalam pemberantasan korupsi. Tetapi nyatanya pada masa Megawati korupsi masih berkembang biak. Namun Megawati telah

⁴⁷ Albab, *A to Z Korupsi*, 133.

⁴⁸ *Ibid.*, 139-140.

berhasil memulai langkah besar dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hingga kini taringnya masih kita rasakan.⁴⁹

Kita patut mengapresiasi warisan pemerintahan Megawati. KPK kini telah melalap banyak koruptor kakap. Kehadiran KPK memberi harapan baru tentang masa depan Indonesia. Maka kita akan melihat, bagaimana pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan SBY sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY hadir dengan semangatnya dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain mengaktifkan KPK secara masif, SBY pada tahun 2005 juga membentuk Timtas Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005. Kedudukan Timtas Tipikor ini di bawah koordinasi langsung Presiden, sehingga mereka harus bertanggung jawab secara langsung, sedangkan KPK menjadi lembaga independen di luar koordinasi presiden.⁵⁰

Era keterbukaan di masa kepemimpinan SBY memberikan peluang yang besar bagi terbukanya sistem pemerintahan yang bersih. Kita bisa benar-benar menyaksikan paradoks antara Era Orde Baru dengan Era Reformasi pada masa pemerintahan SBY. Sehingga kontrol dari masyarakat, pengamat, dan semua elemen kebangsaan benar-benar hadir. SBY sebagai presiden juga sangat menghargai kebebasan berpendapat. Tindakan SBY ini sebenarnya merupakan implementasi dari semangat dasar negara yakni UUD 1945. Sebab negara demokrasi ini dibangun atas dasar kebebasan berekspresi, sehingga

⁴⁹ Ibid., 144-149.

⁵⁰ Ibid., 152-153.

menjadi dusta pemerintah bila mereka tidak menjalankan amanah konstitusi tersebut.

Akibat dari keterbukaan kontrol dan kinerja KPK yang sangat keras, kita terus disodori berbagai kasus korupsi di berbagai lini pemerintahan. Kalau dulu pada masa pemerintahan Suharto korupsi ditutup-tutupi, sekarang korupsi begitu sangat terbuka. Bahkan seolah-olah setiap hari kita disuguhkan beragam kasus korupsi. Korupsi telah menjangkiti elit pemerintah dan swasta dari atas sampai ke bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan hingga lembaga-lembaga yang memiliki tugas melakukan pemberantasan korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan.⁵¹ Fakta ini menjadi penegas betapa korupsi begitu sangat menggurita di negeri ini. Sehingga tak heran bila kesejahteraan rakyat terkatung-katung tak jelas arahnya. Sebab pemerintah yang semestinya melakukan upaya penyejahteraan rakyat malah berdusta dengan memperkaya diri melalui korupsi.

Dalam data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2006, lembaga-lembaga vertikal seperti kepolisian, peradilan, pajak, imigrasi, bea cukai, imigrasi, dan lain sebagainya dipersepsikan sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Sedangkan hasil IPK tahun 2007 yang diluncurkan *Transparency International*, koalisi global untuk melawan korupsi menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia

⁵¹ Ni'am dkk, *NU Melawan Korupsi*, 7.

mengalami penurunan sebesar 0,1 persen ketimbang tahun 2006 (skor 2,4). Dengan skor tersebut, Indonesia termasuk dalam daftar negara terkorup di dunia bersama 73 negara yang skornya di bawah 3.⁵²

Sedangkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan dari akhir tahun 2006 sampai awal tahun 2007 terjadi peningkatan kasus korupsi hingga Rp 14,4 triliun dari 161 kasus korupsi. Kebocoran tersebut terjadi pada pengadaan barang dan proyek pemerintah. Selama lima tahun kebocoran pengadaan barang dan jasa mencapai lebih dari 30 %. Selain itu, masih banyak aset koruptor yang di luar negeri belum dikembalikan.⁵³ Sehingga negara mengalami kerugian yang luar biasa. Korupsi yang meyebar luas ke berbagai lini kehidupan benar-benar mengancam republik ini. Berbagai upaya yang selama ini dilakukan untuk mengukum koruptor tak juga membuahkan hasil maksimal. Tetapi kita tetap harus optimis, bahwa negara kita pasti bebas dari korupsi dengan semangat kebersamaan semua elemen bangsa.

Pada masa kepemimpinan SBY, penulis telah ikut berpartisipasi mengamati problem gurita korupsi. Meski tidak secara keseluruhan dapat penulis potret, tapi setidaknya saya telah aktif menulis di berbagai media massa tentang problem korupsi pada masa ini. Misalnya tentang Korupsi Mantan Ditjen Pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Gayus terbukti melakukan gratifikasi dan pencucian uang senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.⁵⁴ Kasus ini pada saat itu

⁵² Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 5.

⁵³ *Ibid.*, 5-6.

⁵⁴ A. Wisnubrata (ed.), "Berkas Kasus Korupsi Gayus Lengkap", *Koran Online Kompas.com*, (6 Mei 2011).

menjadi kasus yang mengguncang jagat Indonesia, sebab pajak menjadi penghasilan utama negara. Ironisnya, penghasilan utama itu malah dikorupsi oleh pegawainya.

Pada masa kepemimpinan SBY juga, Kementerian Agama yang mestinya menjadi contoh berbagai Kementerian yang lain, malah banyak tersangkut kasus korupsi. Mulai korupsi dana Haji, pengadaan al-Quran, hingga dana proyek pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah. Berdasar penelitian yang dikakukan KPK tahun 2012 dari 22 instansi pusat yang disurvei, Kementrian Agama (Kemenag) menempati peringkat pertama instansi paling korup. Fakta ini tentu mengejutkan benak kita, tetapi bagaimanapun kita tidak bisa membantah hasil survei ini, karena survei ini tentu memiliki bukti konkret yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁵

“Ikhlas Beramal” yang menjadi motto Kemenag hanya sebatas kata-kata yang indah diucapkan, tapi sangat sulit dipraktikkan. Kemenag telah kehilangan misi awalnya sebagai pengawal internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktanya malah banyak aparatur Kemenag yang terseret kasus korupsi lantaran tindak menjalankan ajaran agama berupa kejujuran dan sikap amanah atas tugas yang diembannya. Prilaku korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama. Tindakan ini merugikan banyak orang, bahkan merugikan masa depan negara. Sehingga

⁵⁵ Masduri, “Koruptor Generasi Gayus”, *Republika*, (12 Desember 2012), 6.

korupsi menjadi hal yang mestinya dilawan dengan keras oleh aparaturnya Kemenag.

Kasus yang juga mengguncang jagat Indonesia adalah kasus korupsi Jenderal Djoko Susilo. Sudah banyak kekayaan Djoko Susilo yang disita KPK. Kekayaan jenderal polisi bintang dua yang telah disita KPK antara lain berupa tanah, bangunan rumah, SPBU dan juga mobil mewah. Sebanyak enam rumah di tiga kota, yaitu Semarang, Solo dan Yogyakarta disegel KPK. KPK juga menyegel tiga rumah di Jakarta dan dua rumah di Depok, Jawa Barat. Baru-baru ini, KPK kembali menyita tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diduga milik Djoko Susilo. KPK telah mencatat harta yang “dirampas” sekitar Rp 70 miliar, dari total kekayaan Djoko yang ditaksir mencapai Rp 100 miliar lebih.⁵⁶

Kekayaan sebanyak itu tentu diperoleh dari cara-cara kotor. Tidak mungkin seorang jenderal kepolisian bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari gajinya. Djoko Susilo pasti telah menilap banyak uang proyek untuk kekayaan pribadinya. Tindakan Djoko Susilo semakin memperjelas betapa sangat rakusnya manusia terhadap kekayaan. Ia telah mengorbankan kehormatan dirinya demi kebahagiaan sesaat. Saat ini ia harus menanggung akibat dari perbuatan buruknya. Selain kehormatan diri, nama baik, jabatan yang hilang, ia juga harus mendekam dalam penjara. Bahkan kekayaan yang dulu dikumpulkannya dari korupsi kini disita KPK.⁵⁷

⁵⁶ Masduri, “Disparitas Kekayaan Koruptor dengan Rakyat Miskin”, *Sumut Pos*, (5 April 2013), 12.

⁵⁷ *Ibid.*, 12.

Presiden PKS pun, Luthfi Hasan Ishaq (LHI) juga tersangkut kasus korupsi. Penetapan LHI membuat publik tercengang. Publik kembali geger memperbincangkan panggung politik kaitannya dengan agama di negeri ini. Selama ini PKS dikenal getol menyerukan antikorupsi. Tidak sedikit para politisi PKS yang bermanuver menyinggung perilaku korup elit partai politik yang lain. Terutama pada partai yang berideologi nasionalis. Maka menjadi wajar bila masyarakat gaduh ketika LHI ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor daging sapi. Karena politisi PKS sudah dinilai menyimpang dari garis perjuangannya yang berideologi Islam. Tentu tidak diajarkan dalam Islam berpolitik dengan cara korupsi. Sebagai agama, Islam mengajarkan konsep kejujuran dan keadilan dalam berpolitik. Tetapi nyatanya, itu semua hanya menjadi wacana dalam gerak parpol Islam, termasuk pada PKS sekalipun yang selama ini dikenal sebagai parpol yang sangat fanatik keislamannya.⁵⁸

LHI bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden PKS. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi kurungan 1 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

⁵⁸ Masduri, "Akil, Buku, dan Korupsi", *Radar Surabaya*, (23 Oktober 2013), 7.

menyatakan, Luthfi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.⁵⁹

Kasus korupsi yang melibatkan anak muda juga tidak sedikit. Harapan besar bagi para pemuda yang tampil dalam dunia politik dan pemerintahan hanya menjadi sebuah ilusi di siang hari. Harapan hanya tinggal harapan. Karena realitasnya, mereka tidak lebih dari kepanjangan tangan Orde Baru. Perilaku korupsi masih terus menyertai dunia politik dan pemerintahan. Bahkan banyak masyarakat di pedalaman yang merasa lebih sejahtera dipimpin Suharto ketimbang pemimpin di Era Reformasi. Kenyataan ini seolah menjadi paradoks di tengah gelombang orang-orang yang mengganggu Era Reformasi.⁶⁰

Telah banyak pemuda-pemuda yang diseret ke dalam tahanan, bahkan mereka adalah kader-kader muda dari partai yang sedang berkuasa, yakni Demokrat. Mereka adalah Muhammad Nazaruddin, Angielina Sondakh, dan Andi Mallarangeng. Bahkan KPK menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Anas Urbaningrum adalah tokoh politik muda yang kariernya sangat cepat naik daun. Kariernya dalam dunia politik berawal dari kipranya di dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga kemudian Anas terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI pada kongres di Yogyakarta tahun 1997.⁶¹

⁵⁹ Dian Maharani, "Luthfi Hasan Ishaq Divonis 16 Tahun Penjara", Koran Online Kompas.com, (9 Desember 2013).

⁶⁰ Masduri, "Pemuda dalam Pusaran Korupsi", *Tribun Timur*, (Kamis, 7 Maret 2013), 13.

⁶¹ *Ibid.*, 13.

Terpilihnya Anas sebagai Ketua Umum PB HMI berada di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hingga akhirnya terjadi gejolak gerakan mahasiswa tahun 1998. Gejolak gerakan mahasiswa itu tentu banyak dilakukan oleh HMI sebagai organisasi mahasiswa terbesar. Anas dalam posisinya sebagai Ketua Umum HMI memainkan peranan besar. Hingga akhirnya gerakan mahasiswa itu melahirkan era baru berupa reformasi dengan digulingkannya Suharto dari kursi kepresidenannya pada tanggal 21 Mei 1998. Tumbangya Suharto sekaligus merubah peta politik Indonesia menjadi semakin demokratis.⁶²

Sejak reformasi itu Anas menjadi anggota Tim Revisi Undang-Undang Politik, atau Tim Tujuh, yang menjadi salah satu tuntutan Reformasi. Dalam pemilihan umum demokratis pertama tahun 1999, Anas menjadi anggota Tim Seleksi Partai Politik, atau yang disebut Tim Sebelas, dengan tugas memverifikasi kelayakan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Selanjutnya ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum 2001-2005 yang mengawal pelaksanaan pemilu 2004. Setelah mengundurkan diri dari KPU, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2005 sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah. Hingga akhirnya pada kongres kedua Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.⁶³

Terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menjadi sejarah penting dalam perpolitikan tanah air. Lantaran

⁶² Ibid., 13.

⁶³ Ibid., 13.

Anas menjadi Ketua Umum Partai Politik termuda di Indonesia. Jiwa heroik yang dimiliki seorang pemuda seperti Anas tentu sangat ditunggu kiprahnya. Apalagi ia merupakan mantan Ketua Umum PBI HMI dan mantan aktivis 1998. Tentu banyak sejarah telah diukirnya ketika ia menjadi mahasiswa. Harapan besar pada sosok Anas terus bermunculan, karena ia adalah Ketua Umum Partai Politik yang saat ini menjadi partai penguasa di Indonesia.⁶⁴

Tetapi harapan itu menjadi pupus, karena Anas Urbaningrum menjadi tersangka kasus korupsi Hambalang. Anas akhirnya menyusul Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng mendekam dalam penjara. Ditetapkan Anas sebagai tersangka menambah daftar panjang pemuda yang tersangkut kasus korupsi. Pemuda yang digadang-gadang sebagai agen perubahan sekarang menjadi pelaku kejahatan kerah putih yang jelas-jelas merugikan rakyat. Dulu Anas adalah bagian dari mahasiswa 1998 yang menuntut pelengseran Suharto karena dinilai koruptif, sekarang dirinya juga harus melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena perilaku korupsi yang dilakukannya. Peristiwa ini seperti senjata makan tuan, sekaligus otokritik kepada para pemuda agar menjalankan amanahnya dengan baik. Karena rakyat sedang menunggu kontribusi besar para pemuda, dalam mengawal kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.⁶⁵

Pada akhir kepemimpinan SBY ini, kita kembali disuguhi drama korupsi yang menyayat hati. Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Kasus ini sungguh memukul hati

⁶⁴ Ibid, 13.

⁶⁵ Ibid., 13.

rakyat. Di tengah harapan besar tentang peran pemerintah dalam upaya penyelenggaraan haji yang bersih, malah Menteri Agamanya yang melakukan korupsi haji. Sangat tidak etis, Kemenag mestinya menjadi contoh yang baik dari beberapa instansi negara lainnya. Tetapi Kemenag yang diharapkan menjadi instansi paling bersih malah sebaliknya. Fakta ini menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia masih jauh dari nilai-nilai esensial yang diajarkan dalam agama.⁶⁶

Beberapa catatan tentang korupsi pada masa kepemimpinan SBY ini merupakan catatan penulis sendiri, meski tidak tuntas secara keseluruhan, namun uraian beberapa kasus ini saya kira cukup mewakili gambaran korupsi pada masa kepemimpinan SBY. Meski banyak pejabat pemerintah di lingkungan SBY yang tersangkut korupsi, SBY tetap tegar dan selalu mendengungkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Semoga sikap perang terhadap korupsi yang dimiliki oleh SBY ini senantiasa terus dipegang sampai akhir jabatannya dan dilanjutkan oleh presiden yang baru.

D. Korupsi dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama *rah}mat li al- 'a>lami>n*⁶⁷ tentu punya semangat antikorupsi, karena tidak mungkin Islam akan menjadi rahmat jika membenarkan tindakan korupsi. Islam sangat mengutuk tindakan korupsi, karena itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat mengganggu jalan

⁶⁶ Icha Rastika, "KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka", *Koran Online Kompas.com*, (22 Mei 2014).

⁶⁷ Baca dalam al-Quran, "*Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam* (QS. al-Anbiya' ayat 107).

hidup bersama. Sebagai sebuah agama yang memiliki *shari>ah* sebagai jalan hidup, dalam Islam ada istilah *Maqa>sjid al-Shari>ah*, yaitu makna dan tujuan yang dikehendai oleh syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia. *Maqa>sjid al-Shari>ah*, di kalangan ulama' fikih juga disebut dengan istilah *Asra>r al-Shari>ah*, yakni rahasia-rahasia yang terkandung di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁸

Maqa>sjid al-Shari>ah dalam agama Islam itu ada lima, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam sebagai agama rahmat benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Artinya, berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. melalui syariatnya tidak untuk kepentingan Tuhan, melainkan bagi kemaslahatan umat manusia. Pada konteks ini yang akan menjadi konsentrasi bahasa kita adalah *Hifz}ul al-Ma>l* (memelihara harta). Harta dalam agama Islam harus dipelihara secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai secara batil. Tidak boleh mendzalimi harta anak-anak yatim, mengorupsi, melakukan penyuapan terhadap hakim, memberikan hadiah untuk tujuan tertentu, menggasab, mencuri, dan merampok.⁶⁹ Tindakan tersebut merupakan perilaku terlarang dalam agama Islam, sebab kehadiran Islam punya misi *rah}mat li al-'a>lami>n* yang dalam hal ini tegaskan dalam *Maqa>sjid al-Shari>ah* pada bagian *Hifz}ul al-Ma>l*.

⁶⁸ *Insklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1108. Dalam, Irfan, *Korupsi*, 2.

⁶⁹ *Ibid.*, 4.

Terkait dengan korupsi dalam Islam, tidak ada istilah spesifik yang berbicara tentang korupsi. Tetapi ulama Islam telah menyepadankan istilah korupsi dengan bahasa *Sari>qah*, *Rishwah*, *Ghulu>l*, *Hjira>bah*, dan *al-S}uh}t*. Dengan demikian, meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran dan Hadis, tetapi al-Quran telah mengisyaratkan atau mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global. Misalnya, larangan memakan harta yang didapat secara tidak halal, suap-menyuap, dan lain sebagainya.⁷⁰ Berikut urian istilah yang disepadankan dengan korupsi.

Pertama, Sari>qah. Dalam Islam *Sari>qah* disebut pencurian, yakni mengambil harta orang lain yang sudah disimpan pada tempatnya secara diam-diam untuk dimiliki sendiri.⁷¹ Pencurian dalam Islam merupakan tindakan yang mengancam harta orang lain, karenanya atas semangat *hifz}ul al-Ma>l*, Islam tidak membenarkan pencurian terhadap harta orang lain. Terkait dengan larangan pencurian, Allah SWT telah menegaskan dalam al-Quran Surat al-Ma'idah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kedua, Rishwah. Dalam Islam *Rishwah* disebut suap, yakni sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang

⁷⁰ Ibid., 6.

⁷¹ Ni'am dkk, *NU Melawan Korups*, 98.

salah.⁷² Tindakan seperti ini sering terjadi dalam lingkungan sosial kita. Pertarungan antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menggunakan harta seolah sudah menjadi budaya. Suap tidak dibenarkan karena dapat memunculkan problem sebagai berikut, setidaknya ada tiga.

Riswah dilarang karena dapat menyebabkan proses pemilihan pemimpin maupun keputusan kebijakan pemimpin yang tidak berjalan dengan benar dan dengan semestinya. Misalnya suap saat pemilihan umum, melahirkan pemimpin karbitan yang lahir bukan karena kemampuan dan integritas yang dimiliki oleh orang bersangkutan, melainkan karena membayar kepada rakyat melalui suap yang diberikan. Sehingga bila terpilih nanti, kebijakan yang dilahirkannya tidak pro rakyat dan mereka mengembalikan modal suap yang dulu pernah diberikan kepada rakyat.⁷³

Selain itu, *Rishwah* juga dapat melahirkan keputusan dan kebijakan yang membahayakan kehidupan masyarakat, karena penerima suap akan memprioritaskan pemberi suap dalam kebijakannya, meskipun mengancam kehidupan orang banyak.⁷⁴ Uang dalam hal ini menjadi sangat berkuasa, sebab orang yang disogok menjadi tunduk terhadap orang yang memberikan uang. Contoh nyata dalam hal ini misalnya terkait izin sebuah perusahaan tambang, meskipun mengancam keselamatan lingkungan hidup, karena pejabat terkait mau disuap, mereka mengeluarkan izin pertambangan. Sehingga kerugian nyata menjadi derita bersama.

⁷² Ibid., 100.

⁷³ Ibid., 100-101.

⁷⁴ Ibid., 101.

Terakhir, *Rishwah* juga berdampak terhadap kemandulan hukum, sehingga menjauhkan cita-cita keadilan sosial yang telah ditegaskan dalam Pancasila.⁷⁵ Seorang hakim yang mau disogok, akan mudah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sehingga orang yang semestinya mendapat hukuman malah dibebaskan, bahkan sangat mungkin orang yang sebenarnya tidak bersalah, karena hakim bersangkutan disogok mereka bisa mendekam dalam penjara. Kenyataan seperti ini sebenarnya bukanlah rahasia baru, sudah lama menggurita dalam dunia hukum.

Larangan tentang *Rishwah* sudah ditegaskan oleh Allah SWT. dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 188 sebagaimana berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Ketiga, Ghulu>l. Dalam Islam, menurut al-Azhari *ghulu>l* disebut sebagai pengkhianatan dalam *baitul ma>l*, zakat, dan *ghani>mah* (harta rampasan perang), sedangkan menurut Abu Ubaidillah, *ghulu>l* adalah pengkhianatan dalam rampasan perang saja.⁷⁶ Pada konteks ini, pemaknaan dari al-Azhari sepertinya lebih komprehensif, karena tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang. Sulit bagi kita sekarang menemukan harta

⁷⁵ Ibid., 101.

⁷⁶ Al-Kafawi Ayyub ibn Musa Abi al-Baq'a', *al-Kulliyat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 671. Dalam, Ni'am dkk, *NU Melawan Korupsi*, 101.

rampasan perang, namun jika pada konteks zakat misalnya banyak lembaga negara atau lembaga swasta yang menerima pengeluaran zakat. Mereka menjadi pengelola zakat orang lain. Dalam hal ini Islam sangat melarang sekali pengelola melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang telah diberikan kepada diri atau lembaganya. Zakat adalah amanah, karenanya harus dikelola secara baik dan disampaikan kepada yang benar-benar berhak, sehingga maksud diwajibkannya zakat dalam Islam dapat terealisasi.

Larangan tentang *ghulu>l* dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Surat Al-‘Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Keempat, *H}ira>bah*. Secara harfiah *h}ira>bah* adalah memerangi Allah dan rasulNya,⁷⁷ seperti dijelaskan oleh Allah SWT. dalam surat Al-Ma’idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنْ

⁷⁷ Ibid., 103.

الْأَرْضَ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Mufasssir, salah satunya Fakhrudin ar-Razi memberikan pandangan terkait dengan konteks makna *muh}arrabah* dalam ayat tersebut meliputi *qat}u' al-t}ari>q* (pembegalan jalan). Bahkan sebagian ulama menyebut *hirabah* sebagai *qat}u' al-t}ari>q* sendiri.⁷⁸ *Qat}u' al-t}ari>q* adalah perampasan terhadap harta orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan, baik dengan cara membunuh atau tidak.⁷⁹ Konteks dalam hal ini misalnya perampokan dengan cara kekerasan. Tindakan seperti tentu tidak sejalan dengan sprit *maqa>s}id al-shari>ah*, baik dengan *hifz}ul al-ma>l* (*memelihara harta*) ataupun *hifz}ul al-na}fs* (*memelihara jiwa*).

Kelima, *al-Suh}t*. Dalam Islam, *al-Suh}t* dalam pandangan Ibn Mas'ud seperti dikutip al-Qutubi bahwa *al-Suh}t* adalah melicinkan kepentingan koleganya dengan pemberian sesuatu sebagai balas budi kepadanya.⁸⁰ *Al-Suh}t* ini sebenarnya masuk dalam kategori *rishwah* atau suap. Sebab pemberian yang dilakukan dalam rangka memuluskan kepentingannya. Kenyataan seperti ini sering kita jumpai, uang begitu mudah mengelabui

⁷⁸ Fakhr ar-Razi Mohammad ibn Umar, *Mafatih al-Ghaib* (Taheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., cet. II), juz XI, 214. Dalam Ibid., 102-104.

⁷⁹ Ibid., 104.

⁸⁰ Ibid., 105.

integritas seseorang. Sedangkan hal yang demikian itu merugikan orang lain dan karenanya agama melarang hal tersebut.

Dalam Islam memang tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam mendeskripsikan persoalan korupsi, namun beberapa uraian di atas mengenai cara-cara haram dalam mendapatkan harta memberi gambaran secara umum, bahwa sedikitnya spirit korupsi ada dalam lima perbuatan tercela tersebut. Islam melarang perbuatan yang demikian, karena bertentangan dengan spirit *maqasid al-shari'ah* yang merupakan spirit dasar dari agama Islam sebagai agama yang *rahmat li al-'alamin*. Sebagai rahamat, Islam harus selalu hadir sebagai penyejuk kehidupan. Memberi warna yang berarti bagi kebaikan dan keadaban hidup. Agama punya peran besar dalam kehidupan, sebab ruh agama datang dari Tuhan sebagai pencipta jagat semesta.

Jika dicermati secara mendalam, mengapa kemudian korupsi disepadankan dengan berbagai tindakan tercela di atas, karena dari sisi pengambilan terhadap harta atau hak orang lain, korupsi sangat dekat dengan *sariqah* (pencurian). Dari sisi melibatkan kekuasaan, korupsi sangat dekat dengan *rishwah (suap) dan al-suht*. Sedangkan dari sisi penggelaman harta publik, korupsi sangat dekat dengan *ghulul*. Terakhir, dari segi dampak yang ditimbulkannya, korupsi sangat dekat dengan *hijrah*. Korupsi sangat mengancam jiwa dan harta orang banyak. Karenanya spirit korupsi jelas-jelas terdapat dalam lima tindakan terscela yang telah diurai di atas.⁸¹

⁸¹ Ibid., 107-111.

Sebaliknya, sebagai agama *rah}amat li al-'a>lami>n*, Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kepemimpinan. Konsep *rah}amat li al-'a>lami>n* adalah konsep besar dan megah. Konsep ini menjadi penanda betapa Islam yang diharapkan menjadi ajaran yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta, tidak hanya bagi orang-orang Islam, namu bagi nom muslim. Nabi Muhammad membawa Islam dengan kebahagiaan, dalam bahasa al-Sabuni, risalah Nabi adalah risalah kebahagiaan.⁸² Nabi Muhammad hadir membawa harapan baru bagi peradaban dunia. Tak hayal kehadirannya begitu sangat dirindukan, sebab sebelumnya kehidupan dunia karut-marut, antara yang baik dan yang baruk tak menentu.

Dalam pandangan M. Helmi Umam, konsep *rahamat li al-'a>lami>n* jika dikaitkan dengan korupsi merupakan tindakan jahiliyah. Islam mengajarkan bahwa tindakan penindasan, kesewenang-wenangan, dan merupakan perilaku yang dilarang, karena hal itu sangat merugikan orang lain.⁸³ Islam benar-benar menghendaki keadaban hidup, sebagai cita-cita bersama kemanusiaan. Cita-cita ini bakal terwujud bila semua masyarakat punya semangat yang besar dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa-bernegara yang baik. Karenanya Nabi sebagai teladan dalam kehidupan, senantiasa memberikan contoh yang baik dalam semua aspek kehidupan.

Dalam konteks kepemimpinan, sejarah telah banyak mencatat prestasi-prestasi yang dicapai oleh Nabi Muhammad. Bahkan ilmuan Barat,

⁸² Sjechul Hadi Permono, *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi* (Orasi Ilmiah dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 10 Agustus, 1994), 14. Dalam M. Helmi Umam, "Pandangan Islam Tentang Korupsi", 465.

⁸³ *Ibid.*, 165.

Michael H. Hart, menempatkan Nabi Muhammad pada posisi pertama dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia. Tentu perankingan ini berdasar fakta sejarah yang telah dikaji secara mendalam. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pengaruh Nabi Muhammad bagi kaumnya begitu besar, sebab disamping ia adalah seorang Nabi yang diutus menyampaikan risalahNya, Nabi Muhammad juga seorang kepala negara.⁸⁴

Masih dalam catatan Michael H. Hart dalam bukunya *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*, Nabi Muhammad telah mampu merubah bangsanya yang egoistis, barbar, terbelakang, dan terpecah belah karena sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang maju secara ekonomi, kebudayaan, dan kemiliteran. Bahkan mampu mengalahkan militer Romawi yang saat itu dikenal militer kuat di dunia.⁸⁵

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memimpin Madinah, karena pola kepemimpinannya bertolak kepada empat sikap yang biasa kita sebut sebagai sifat wajib seorang rasul. Yakni, *s}iddi>q* (jujur), *ama>nah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fat}a>nah* (cerdas). Keempat sikap ini tidak saja diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam posisinya sebagai rasul, namun juga dalam posisinya sebagai kepala negara, sikap dan tindakannya juga berlandaskan keempat sikap tersebut.⁸⁶

Tidak mungkin Nabi Muhammad akan sukses memimpin bangsa Arab tanpa keempat sikap tersebut. Sebab kejujuran sudah pasti menjadi kunci

⁸⁴ Michael H. Hart, *100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang Sejarah*, terj. Ken Ndaru & M. Nurul Islam (Jakarta: Hikmah, 2009), 1.

⁸⁵ Ibid., 1.

⁸⁶ Masduri, "Wahai Pemimpin, Tirulah Teladan Nabi Muhammad", *Sinar Harapan*, (6 Februari 2012), 4.

utama kesuksesan seorang pemimpin. Mustahil orang yang tidak jujur akan bisa membawa perubahan bagi bangsanya. Secara eksplicit jujur dalam konteks kepemimpinan bisa dimaknai keselarasan antara ucapan dan tindakan, serta komitmennya terhadap kepemimpinan yang sedang diembannya.⁸⁷

Berlanjut pada amanah, bilamana orang jujur sudah pasti akan amanah. Sebab amanah merupakan salah satu implikasi dari sikap kejujuran. Dengan bahasa sederhana, orang yang jujur sudah pasti amanah. Sehingga antara jujur dan amanah seperti mata rantai yang saling berkaitan. Begitupun dengan sikap yang ketiga, *tabligh* (menyampaikan). Jika dalam konteks kenabian makna *tabligh* terbatas pada penyampaian Nabi Muhammad atas semua risalah Tuhan kepada umatnya. Maka dalam konteks kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai kepala negara, *tabligh* dapat dimaknai sebagai bentuk penyampaian seorang pemimpin atas amanah konstitusi negara. Penyampaian amanah konstitusi misalnya, menjaga kesejahteraan rakyat, keadilan, kemanan, dll.⁸⁸

Sikap *tabligh* juga tidak lepas dari kedua sikap sebelumnya, yakni *sjiddi>q* dan *ama>nah*. Pemimpin yang jujur dan amanah, pasti ia akan *tabligh*. Sebab *tabligh* merupakan dampak dari kedua sikap tersebut. Terakhir adalah sifat *fat}a>nah*. Seorang pemimpin yang ideal juga harus memiliki katagori ini, yakni cerdas. Sikap cerdas menjadi modal dasar bagi siasat seseorang dalam memimpin masyarakatnya. Misalnya, kecerdasan

⁸⁷ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana, 2013), 290.

⁸⁸ Masduri, "Wahai Pemimpin", 4.

dalam menyejahterakan rakyat, kecerdasan dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, serta kecerdasan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara dari ancaman luar.

Keempat sikap tersebut telah terbukti mampu membawa kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad, baik sejak ia di Madinah atau pasca pembukaan kota mekah (*fathjul Makkah*), di mana saat itu kekusaan Islam terus menyebar luas. Bahkan Nabi Muhammad hanya butuh sebelas tahun dalam menaklukkan seluruh jazirah Arab.⁸⁹

Selain keempat sikap tentu masih banyak sikap-sikap bijak lainnya, sebagai bumbu yang mampu memaniskan kepemimninan yang pernah dicapai oleh Nabi Muhammad. Seperti sikap pemberani, tegas, berpendirian kokoh, respek dan memahami kebutuhan msyarakat.⁹⁰

Dalam konteks Indonesia, negara kita sekarang sedang limbung karena beragam persoalan yang menderanya. Berupa korupsi, ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, dan sekian persoalan lainnya. Persoalan ini lahir karena pemimpin kita tidak memiliki integritas tinggi seperti halnya Nabi Muhammad yang telah diuraikan di atas.

Mungkin ada bahasa, Nabi Muhammad adalah manusia sempurna yang dipilih oleh Allah SWT. Sekarang konteks kita bukan dalam posisi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, namun fakus pada posisi Nabi Muhammad sebagai kepala negara atau pemimpin bangsa, atau dengan bahasa lebih jelas,

⁸⁹ Ibid., 4.

⁹⁰ Ibid., 4.

Nabi Muhammad dalam posisinya sebagai kepala negara adalah manusia biasa.

Pada posisi ini Nabi Muhammad, juga sama seperti manusia atau pemimpin pada umumnya, kemungkinan untuk melakukan tindakan penyimpangan juga ada. Namun karena Nabi paham posisi dan tanggung jawabnya, sehingga ia bisa menjalankan amanahnya sebagai kepala negara dengan baik. Saya percaya, seandainya para pemimpin berpegang pada prinsip agama, secara khusus dalam hal ini agama Islam, niscaya berbagai tindakan penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak akan terjadi. Sebab ajaran Islam lahir untuk menebar rahmat dan kasih sayang bagi semesta sebagai agama *rah}mat li al-'a>lami>n*.